**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten/Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menentukan Kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka dipandang perlu merumuskan kewenangan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Daerah adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menentukan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan sebagai Daerah Otonom
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Bupati adalah Bupati Way Kanan
6. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Lampung sebagai daerah Otonom

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kewenangan Kabupaten mencakup semua kewenangan Pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
 - A. Bidang Pertanian
 1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian.
 2. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
 3. Pemberian ijin usaha di bidang pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi.
 4. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan.
 5. Penyelenggaraan penanggulangan wabah, hama dan penyakit menular di tingkat lokal.
 6. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian.
 7. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan Propinsi.
 8. Penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten.
 9. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal.
 10. Penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan dan pelayanan peternakan.
 11. Pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan.
 12. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan ternak/hewan.

13. Penanggulangan penyakit ternak/hewan.
14. Pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/hewan, peternakan, rumah sakit ternak/hewan.
15. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah lokal.
16. Pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan, peralatan dan sejenisnya) dan pengawasannya.
17. Penerapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah perairan umum Kabupaten.
18. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat, perairan wilayah Kabupaten, kecuali penangkapan ikan secara tradisional.
19. Penataan dan pengelolaan perairan darat dan perairan umum, untuk budidaya perikanan.
20. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
21. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan.
22. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan.
23. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan.
24. Pengelolaan dan pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten.

B. Bidang Pertambangan dan Energi

1. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif.
2. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah.
3. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum.
5. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak.
6. Penetapan dan penyelenggaraan serta pengawasan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional.
7. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas kabupaten.
8. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral, energi, serta air bawah tanah.
9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum.
10. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah.

C. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.
2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun.
3. Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak bersifat lintas Kabupaten.
4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten.
5. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
6. Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan non lintas Kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai.

8. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
9. Pengesahan rencana tebang tahunan.
10. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
11. Pengaturan hutan rakyat.
12. Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan.
13. Pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan dan perkebunan (pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman).
14. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
15. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan untuk pariwisata alam.
16. Pengaturan penyuluhan kehutanan dan perkebunan.
17. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
18. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan.
19. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet.
20. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan.
21. Pengaturan dan pengelolaan persuteraan alam.
22. Pemberian ijin dan pengawasan industri primer perkebunan.
23. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan.
24. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan pengawasan dan pengendalian areal perkebunan dan kawasan hutan.
25. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
26. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.

D. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengawasan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
3. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen.
4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan masyarakat umum, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem pergudangan.
6. Penyelenggaraan sistem dan pengawasan distribusi bahan-bahan pokok.
7. Pemberian ijin usaha dan pengawasan industri.
8. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perdagangan.
9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan ijin kawasan industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten.
10. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan untuk pengrajin.
11. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
12. Pengendalian Pencemaran dan Limbah Industri.
13. Penyelenggaraan dan pengawasan tera dan tera isi ulang UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan).

14. Pemberian ijin dan pengawasan gudang.
15. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) Barang.
16. Memfasilitasi permodalan, manajemen, kelembangaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah (PK & M).

E. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

1. Pengesahan akta pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi.
2. Pengawasan penyelenggaraan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
3. Penyelenggaraan penyertaan modal pada koperasi.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi serta pengusaha kecil dan menengah.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.
6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan (DIKLAT) dan penyuluhan.

F. Bidang Penanaman Modal

1. Persetujuan penanaman modal kecuali usaha berteknologi tinggi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi (persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika).
2. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

G. Bidang Kepariwisata

1. Penetapan inventarisasi dan pengaturan objek wisata.
2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perhotelan, rumah makan, restoran serta sejenisnya.
3. Pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya.
4. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, bumi perkemahan dan pondok wisata.
5. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang olah raga, dan olah raga rekreasi lainnya.
6. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya.
7. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
8. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kepariwisataan.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan standar dan norma dan sarana kepariwisataan.

H. Bidang Ketenagakerjaan

1. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan balai latihan kerja.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
3. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
4. Penetapan kebutuhan fisik minimum.